

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan akses

pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, diantaranya dengan menyediakan pelayanan pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tidak hanya pendidikan formal tetapi penyediaan akses pendidikan nonformal oleh PKBM Al Bantani.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program PKBM Al Bantani di antaranya Pendidikan Keaksaraan

Fungsional (Pemberantasan Buta Aksara), Pendidikan Kesetaraan yang terdiri dari Paket A, B, dan C, Pendidikan Kecakapan Keluarga, Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM), Pendidikan Keluarga

dan Remaja, Pendidikan Kecakapan Hidup, dan pendidikan berbasis masyarakat lainnya. Segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memberikan pelayanan pendidikan pada

Suku Asli.

Suku Asli adalah masyarakat adat yang terasing. Komunitas Adat

Terpencil tidaklah dapat dipersamakan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada Suku Asli pada bidang pendidikan, pemerintah wajib

menyediakan akses pendidikan yang dapat dijangkau dan diterima oleh Suku Asli. Di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa masyarakat daerah

terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat terpencil yang terpencil berhak memperoleh layanan pendidikan khusus.

2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam

penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Tanggung jawab pemerintah

kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan untuk

menjalankan kewajibannya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat dibutuhkan untuk memberikan akses kesejahteraan pada Suku Asli. Dalam menjalankan tugas Pemerintah Kabupaten

Bengkalis harus menghadapi berbagai hambatan diantaranya, masih kurang kesadaran akan pendidikan serta masalah ekonomi yang dialami oleh komunitas Suku Asli. Kurangnya kesadaran akan

pentingnya pendidikan menjadi persoalan yang harus dihadapi

Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hampir semua orangtua dari anak-

anak Suku Asli memang tidak berpendidikan sehingga kebiasaan orangtuanya tersebut diturunkan ke anak-anaknya, yang mana lama-kelamaan menjadi masalah sosial. Pada umumnya anak-anak Suku

Asli apabila sudah bisa membaca dan menulis maka akan memilih berhenti bersekolah, bagi sebagian Suku Asli pendidikan bukan hal yang penting, yang penting adalah bekerja, pendidikan dirasa cukup

apabila sudah bisa membaca. Selain persoalan kurangnya kesadaran akan pendidikan, masalah ekonomi juga menjadi hambatan anak-anak Suku Asli untuk mendapatkan akses Pendidikan. Saat ini masih bisa

ditemukan Suku Asli yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka tidak jarang anak-anak Suku Asli tidak bersekolah dan memilih untuk bekerja di usia yang masih kecil, kewajiban mengenyam pendidikan

pun tidak dilakukan. Biaya pendidikan di Kecamatan Bantan tidak dikenakan biaya, hanya setiap siswa diwajibkan membayar biaya seragam dan perlengkapan belajar lainnya.

3. Solusi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penyediaan akses pelayanan pendidikan pada Suku Asli di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki kewajiban untuk mensejahterakan Suku Asli salah satunya melalui bidang pendidikan. Ketika melaksanakan kewajibannya

Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menghadapi berbagai

hambatan di antaranya permasalahan kemiskinan dan kurangnya

kesadaran akan pendidikan. Permasalahan pendidikan pada Suku Asli menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang belum terselesaikan. Melihat permasalahan yang ada, penulis

memberikan solusi dari hambatan yang ada yang pertama hambatan kemiskinan, kedua kurangnya kesadaran akan pendidikan. 1.

Hambatan kemiskinan : a. Mensosialisasikan Program Keluarga

Berencana (KB). b. Memperluas lapangan kerja. 2. Hambatan

kurangnya kesadaran akan pendidikan : a. Mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan. b. memberikan

beasiswa bagi masyarakat Suku Asli.

Kemudian yang juga perlu dilakukan adalah meningkatkan peran pihak swasta, serta perlu adanya komunikasi yang dijalin antara Pemerintah

dan masyarakat Suku Asli, selama ini pemerintah kurang melakukan komunikasi dengan Suku Asli, sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik. Dengan adanya komunikasi maka aspirasi dari Suku Asli

dapat tersalurkan dengan baik, pada akhirnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan lebih tepat sasaran.

B. Keterbatasan

Dalam penyusunan penelitian dalam skripsi ini, peneliti terkendala beberapa permasalahan yang cukup menyulitkan penulis, diantaranya :

1. Salah satu kesulitan yang dialami penulis ialah keterbatasan sumber literature atau buku, terdapat keterbatasan sumber buku yang membahas mengenai Suku Asli lebih khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini menjadi suatu kendala bagi penulis dalam melakukan penelitian mengingat sumber buku merupakan sumber yang penting.
2. Keterbatasan waktu, karena objek penelitian penulis diluar batam, sehingga penulis harus menyediakan waktu untuk mempelajari serta mencari sumber mengenai Suku Asli.

C. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, penulisan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penulis melihat bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan pendekatan dengan cara melakukan komunikasi dengan masyarakat Suku Asli. Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di beberapa desa, kebanyakan narasumber berpendapat bahwa perhatian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dirasa masih kurang.

Dengan adanya komunikasi maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menerima aspirasi dari masyarakat Suku Asli terutama yang terkait dengan pendidikan. Dari data yang penulis dapatkan akses pendidikan formal di Kecamatan Bantan sudah memadai akan tetapi ketersediaan sekolah tidak menjamin Suku Asli untuk mengenyam

pendidikan dengan baik, tidak jarang bisa ditemukan Suku Asli yang pendidikannya masih rendah.

Setelah melakukan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat

Suku Asli, karena pada saat ini masih ada Suku Asli yang peduli akan pendidikan masih sangat rendah, maka tidak jarang angka putus sekolah sering terjadi. Pemerintah juga perlu merencanakan program-program

yang dapat mengatasi kemiskinan seperti membuka lapangan kerja, memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi, dan mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB).